



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dapat disusun dengan baik.

Renja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pangan, pertanian, peternakan, serta kesehatan hewan di wilayah Kota Cimahi.

Penyusunan Renja ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, Renja Tahun 2026 juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian.

Akhir kata, kami berharap Renja Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya pembangunan sektor pangan dan pertanian yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Cimahi.

Cimahi, 22 Agustus 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN



TITA MARIAM, S.Pt, M.M
NIP. 197007061998032006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Merujuk pada ketentuan tersebut, Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026 disusun sebagai respons strategis terhadap dinamika kebijakan pembangunan yang mengalami pergeseran signifikan pada awal periode perencanaan tahun 2026. Periode ini menandai fase transisi pemerintahan di tingkat nasional dan daerah, ditandai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Perubahan kepemimpinan tersebut melahirkan dokumen perencanaan jangka menengah baru, baik di tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, maupun di tingkat daerah melalui RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2030, yang membawa arah kebijakan dan prioritas pembangunan baru. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan RKPD agar tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta sinergis dengan kebijakan nasional dan

provinsi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun berjalan.

Selain kerangka perencanaan, Rencana Kerja Tahun 2026 juga merespons terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap prioritas nasional dan hasil Pilkada Serentak 2026. Penyesuaian ini mencakup integrasi isu-isu strategis nasional seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor ketahanan pangan, industri kreatif, dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang masih berimbas pada perencanaan anggaran di Tahun 2026, menekankan pentingnya efisiensi anggaran operasional dan optimalisasi alokasi belanja pada sektor prioritas. Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* belanja ke sektor strategis, membatasi belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan honorarium, serta menyesuaikan rencana

pendapatan terutama yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini berdampak langsung terhadap struktur dan komposisi belanja dalam dokumen RKPD, sehingga memerlukan penyesuaian melalui proses perubahan.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024 serta realisasi capaian pembangunan hingga Triwulan I Tahun 2025, teridentifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek substansi perencanaan. Sehingga perlunya penyesuaian terhadap indikator kinerja, target sasaran, prioritas pembangunan, dan alokasi pendanaan, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kondisi aktual. Penyesuaian ini juga penting untuk memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, serta untuk memastikan tercapainya hasil yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

RKPD Tahun 2026 ini juga menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta menjadi bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, penyusunan dokumen ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, penyusunan Rencana Kerja 2026 merupakan langkah yang sistematis, terukur, dan berbasis regulasi untuk menjamin

keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kota. Dokumen ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan pembangunan yang terencana, responsif, dan akuntabel dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2026 Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025–2045;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 64);
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 791);
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan terbaru sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026. Hal ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Pemerintah Pusat yang dituangkan melalui berbagai regulasi, surat edaran, serta respons terhadap hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah hingga Triwulan II Tahun 2025. Maka maksud dan tujuan disusunnya Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Memungkinkan bagi Dinas Pangan Dan Pertanian dapat menentukan arah kebijakan pembangunan daerah urusan pangan tahun 2026, menetapkan prioritas dan berbagai rencana program dan kegiatan yang strategis dengan memanfaatkan peluang yang ada serta berbagai keunggulan internal Dinas guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara khusus dan visi dan misi Wali Kota Cimahi;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah urusan pangan tahun 2026 sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2030 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026;
- c. Menjadi landasan atau pedoman kerja bagi Dinas Pangan dan Pertanian ke depan, penyelarasan kebijakan provinsi dan

kabupaten/kota, sehingga berbagai keputusan penting dan utama dapat dilakukan dengan lebih terarah dan fokus guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;

- d. Mengantisipasi dan meminimalkan berbagai pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan yang direncanakan pada lima tahun;
- e. Menjadi kerangka kerja bagi pimpinan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian aktivitas selama satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, memungkinkan bagi setiap pihak di Dinas Pangan dan Pertanian, khususnya pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga visi misi perangkat daerah yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah,

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah dan pemaparan program, kegiatan dan sub. Kegiatan perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota, prioritas perangkat daerah dan Rencana kerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi penting dilakukan untuk menilai, dan menganalisis sejauh mana suatu program, rencana, atau kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
TUJUAN III Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah						
SASARAN III.3 Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	77.04 Nilai	78,74	102,20
TUJUAN IV Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi						
SASARAN IV.2 Mempercepat Peningkatan Pemerataan Pendapatan	Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Ekonomi	Kualitas Pembangunan ekonomi	Nilai PPH Ketersediaan	2183 Nilai	2186	100,14
			Skor PPH Ketersediaan	89,6 Nilai	93,9	104,8
			Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1.32 persen	3,80	287,88
TUJUAN V Menurunnya Angka Kemiskinan						
SASARAN V.1 Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasil n rendah	Belum optimalnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Kemiskinan	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	100

Berdasarkan tabel 1 di atas, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di Tahun 2024 memiliki 5 Indikator Kinerja Utama, yaitu: Nilai PPH Ketersediaan (Target 2183, Realisasi 2186, Capaian 100,14%), Skor PPH Ketersediaan (Target 89,6, Realisasi 93,9, Capaian 104,8), Persentase Nilai PDRB sektor Pertanian (Target 1,32%, Realisasi 3,80%, Capaian 287,88) Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (Target 100%, Realisasi 100%, Capaian 100%) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Target 77.04, Realisasi 78,74, Capaian 102,20)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2024, Pada tahun 2024 Dinas Pangan dan Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis untuk 3 (tiga) urusan yaitu urusan pangan, pertanian dan perikanan dan kelautan, dan terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), 1 (satu) IKU untuk urusan pangan dan 4 (empat) IKU untuk urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan. Adapun evaluasi hasil pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 tercantum pada tabel berikut 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	116,79	BB	0	BB	56,25
		Indeks Profesionalitas ASN	65	68,45	68,5	80	100,66	68,5	0	80	123,08
		Nilai IKM Perangkat Daerah	81	81,07	81,5	82,04	100,00	82	0	82	101,23
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya koordinasi dan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	25	100	56,25
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Forum Perangkat Daerah, jumlah dokumen perencanaan, DPA/RKA murni/perubahan dan jumlah koordinasi terkait perencanaan, DPA/RKA murni/perubahan	12	12	12	12	100,00	12	3	100	56,25
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja perangkat	4	4	4	4	100,00	4	1	4	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	daerah, laporan keuangan dan jumlah koordinasi terkait capaian kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah									
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah dan jumlah koordinasi terkait evaluasi kinerja perangkat daerah	4	4	4	4	100,00	4	1	4	56,25
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji ASN	14	14	14	14	100,00	14	4	14	56,25
		Jumlah bulan tunjangan ASN	12	12	14	14	116,67	12	3	14	116,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	53	52	52	100,00	52	50	52	56,25
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi administrasi kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	100	100	100	100	100,00	100,00	25	100	56,25
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen laporan fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	100	56,25
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	100	100	100	100	100,00	100,00	25	100	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
		administrasi umum perangkat daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan logistik kantor	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	2	2	100,00	12	3	12	56,25
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang	100	100	0	0	0,00	100	25	75	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	1	1	1	56,25
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya	laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya	1	1	0	0	0,00	3	0	0	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	0	0	0,00	100	25	75	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan bulan Jasa komunikasi jasa air dan listrik	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100,00	100	25	100	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	4	4	4	100,00	5	3	4	56,25
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	2	2	2	100,00	2	1	2	56,25
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	E = 2.380 P = 68	E =2.183 P = 68,2	E =2.186 P =75,7	E = 100,13 P = 110,99	E =2.350 P = 67,9	0	0	E=2186 P=75,7	91,84
		Rata-rata konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	E = 2.100 P = 63	E = 1993,4 P = 61,3	E = 1.994 P = 60,7	E = 100,03 P = 106,49	E = 2100 P = 57	0	0	E=1994 P=60,7	96,34
	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pahan Pokok	12	12	12	12	100,00	12	3	12	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Sub. Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	1	1	1	100,00	1	0	1	56,25
	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah unit Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3	19	24	24	100,00	24	7	50	1666,67
	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Pangan Cadangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebutuh an pangan daerah (%)	25,53	65,31	70	96,65	138,07	100	0	96,65	378,57
	Sub. Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	48	16	20	20	100,00	14	0	36	75,00
	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH Konsumsi (skor)	84,2	90,4	90,14	90,14	100,00	90,4	0	90,14	107,05
	Sub. Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah laporan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dok	4	1	2	2	100,00	2	0	3	75
	Sub. Keg. Pemberdayaan	Jumlah Pemberdayaan	6	8	4	4	100,00	4	1	13	216,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)									
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100	100	100	100	100,00	100	0	100	50
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah (kecamatan)	3	3	3	3	100,00	3	0	3	50
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	4	1	1	1	100,00	1	0	2	50
	Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (Jumlah KK yang tertangani)	2000	1623	1760	1760	100,00	100	0	3383	169,15
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	3	100,00	3	0	4	400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12	12	2	2	100,00	12	3	12	56,25
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	80	98	90	98	108,89	95	0	98	122,50
	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ke retail atau pasar (kali)	24	24	12	12	100,00	12	3	39	162,50
	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah laporan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dok	1	1	0	0	0,00	0	0	1	100,00
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100,00	1	0	2	50,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	12	12	100,00	12	3	16	1600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Ikan Konsumsi (Ton)	290	289,3	290	290.376	100,13	291	0	290.376	100,13
		Produksi Ikan Hias (Ekor)	2.375.000	2.464.920	2.470.000	2.479.098	100,37	2.480.000	0	2.479.098	104,38
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan (Kelompok)			16	17					
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	18	15	4	4	100,00	4	0	19	105,56
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan (ekor)	97.725	110.478	97.725	143.750	147,10	108.000	24.728	278.956	285,45
		Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (ekor)	7.500	9.060	7500	7.780	103,73	8.250	1.958	18.798	250,64
		Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	47.000.000	45.516.250	50.000.000	60.472.500	120,95	54.000.000	5.760.000	111.748.750	237,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan	Jumlah Data dan Informasi	2	2	2	2	100,00	2	0	2	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Informasi 5Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (dok)									
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (unit)	4	1	1	1	100,00	1	0	3	50
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	1	1	2	2	100,00	2	0	2	200
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil (UPI)	10	10	10	17	170,00	10	0	27	270,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	5	1	25	27	108.00	1	0	28	
	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jumlah unit usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan						1	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (2025)	Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian (persen)	30	30	30	30	100,00	30	0	30	50
		Jumlah kawasan yang dikelola	1	1	1	1	100,00	1	0	1	50
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)	4	1	1	1	100,00	1	0	2	50
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Jml. Kelurahan yang dilayani)	100	100	100	100	100,00	100	0	100	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi vaksinasi rabies (dosis)	2000	1300	1000	1894	189,40	4240	0	3194	159,70
		Jumlah fasilitasi vaksinasi flu burung (dosis)	1500	600	600	968	161,33	600	0	1568	104,53
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah laporan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4	4	2	2	100,00	4	0	4	50
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4	0	0	0	0	4	1	1	25
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan kurban yang diperiksa	12000	3613	3000	3870	129,00	3000	0	7483	62,36
		Jumlah pengujian pangan asal hewan	200	10	30	21	70,00	6	28	59	29,50
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan	Jumlah laporan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	4	2	2	100,00	4	1	7	175,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM										
	Keg. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	7000	8007	6500	8937	137,49	7500	2171	19.115	273,07
		Jumlah penerimaan retribusi	303.875.000	325.970.000	275.650.000	361.860.000	131,28	303.215.000	99.485.000	787.315.000	259,09
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	48	12	12	12	100,00	12	3	27	56,25
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	100	100	100	100,00	100	25		56,25
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	20	9	5	7	140,00	6	0	11	55,00
	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dok)	20	9	5	7	140	6	0	16	80
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10	11,76	11,76	15	127,55	11,76	0	11,76	117,60
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang naik skor kelompok	17	41	6	11	183,33	6	0	41	241,18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	33	33	33	33	100,00	33	0	33	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyediaan prasarana pertanian yang dikembangkan (benih, pupuk, obat2 an dan pestisida media tanam)	5	5	6	6	100,00	5	0	11	220,00

Tabel 2.2 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2024 telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Capaian kinerja program dan kegiatan di Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II bisa dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
Periode Pelaksanaan s.d. Triwulan II Tahun 2025

[illegible]

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinya dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	589.760.700	25	75.840.000	25	151.653.850	-	-	-	-	50	227.493.850	25%	13%
2.09.01.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	55.888.050	3	2.400.000	3	25.091.050	-	-	-	-	6	27.491.050	50%	49%
2.09.01.2.01.00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	24.397.850	1		1	16.246.800	-	-	-	-	2	16.246.800	25%	67%
2.09.01.2.01.00 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	503.474.800	1	73.440.000	1	110.316.000	-	-	-	-	2	183.756.000	50%	36%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Gaji ASN	14	Bulan	8.720.819.624	4	1.640.524.176	4	2.510.576.026	-	-	-	-	8	4.151.100.202	57%	48%
		Jumlah Bulan Tunjangan ASN	12	Bulan		3		4	-	7	-	-	-	7		58%	
2.09.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Orang/ Bulan	8.720.819.624	50	1.640.524.176	55	2.510.576.026		-	-	-	50	4.151.100.202	106%	48%
2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	80	orang	104.368.000	79	0	-	68.918.000	-	-	-	-	79	68.918.000	0	95%
2.09.01.2.05.00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	31.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.01.2.05.00 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	55	Orang	72.568.000	53	-	0	68.918.000	-	-	-	-	53	68.918.000	96%	95%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		Perundang Undangan															
2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	610.638.150	3	107.523.000	3	52.181.398	-	-	-	-	6	159.704.398	50%	26%
2.09.01.2.06.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.890.000	1	9.115.000	-	-	-	-	-	-	1	9.115.000	50%	92,16%
2.09.01.2.06.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Paket	269.089.400	1	34.113.400	-	19.130.000	-	-	-	-	1	53.243.400	50%	20%
2.09.01.2.06.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik kantor yang disediakan	2	Paket	37.424.000	1	6.243.000	0	6.741.000	-	-	-	-	1	12.984.000	50%	35%
2.09.01.2.06.00 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	15.198.750	1	3.963.200		1.961.250	-	-	-	-	1	5.924.450	50%	39%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
2.09.01.2.06.00 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	2	Laporan	12.474.000	0	2.760.000	-	-	-	-	-	-	0	2.760.000	0	22,13%
2.09.01.2.06.00 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	210.650.000	3	66.753.000	-	-	-	-	-	-	3	66.753.000	3	31,26%
2.09.01.2.06.00 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Peerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	55.912.000	0	1.845.719	-	-	-	-	-	-	2	1.845.719	0	3,30%
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12	Bulan	417.360.000	3	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.01.2.07.00 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas	1	Unit	167.400.000	3	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan															
2.09.01.2.07.00 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	249.960.000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan	353.517.000	3	96.759.669	-	-	-	-	-	-	3	96.759.669	25%	27,37%
2.09.01.2.08.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000	3	600.000	-	-	-	-	-	-	3	600.000	25%	50%
2.09.01.2.08.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	91.337.000	3	17.160.788	-	-	-	-	-	-	3	17.160.788	25%	18,79

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
2.09.01.2.08.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12	laporan	260.980.000	3	78.998.881	-	-	-	-	-	-	25	78.998.881	3	30,27%
2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	100	Persen	187.884.750	25	42.988.355	-	-	-	-	-	-	25	42.988.355	25%	22,88%
2.09.01.2.09.00 02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang dipelihara daan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	171.854.750	3	34.730.355							3	34.730.355	3	20,21%
2.09.01.2.09.00 10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang	2	unit	16.030.000	1	8.258.000	-	-	-	-	-	-	1	8.258.000	50%	51,52

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		dipelihara/direha bilitasi															
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	Energi = 2350 Protein = 67.9	kkal/kap /hari gr/kkal/h ari													
		Rata-rata konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	Energi = 2100 Protein = 57	kkal/kap /hari gr/kkal/h ari													
2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficent Varian) Bahan Pangan Pokok	12	Laporan	289.598.350	3	54.713.739	-	-	-	-	-	-	3	54.713.739	25%	18,89%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
2.09.03.2.01.00 1	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24	unit	186.257.800	7	53.256.739	-	-	-	-	-	-	7	53.256.739	29%	28,59%
2.09.03.2.01.00 12	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Neraca Bahan Makanan (Dok NBM)	1	Laporan	8.898.000	0	630.000	-	-	-	-	-	-	0	630.000	0	
2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebutuhan pangan daerah)	100	Persen	267.557.980	0	0	-	-	-	-	-	-	0	65.211.100		
2.09.03.2.02.00 03	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14	Ton	267.557.980	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

[illegible]

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	KERAWANAN PANGAN	kerawanan pangan yang tertangani															
2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan (Kecamatan)	3	Kecamatan													
2.09.04.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan (Dok)	1	Dokumen	19.157.300	0	0	-	-	-	-	-	-	-	19.157.300	0	0%
2.09.04.2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (KK)	100	Persen	1.877.838.400	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.04.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	Informasi Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	3	Dokumen	1.868.871.000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
2.09.04.2.02.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	8.967.400	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	95	Persen	128.011.100	0	80.111.400								80.111.400	0	63%
2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ke retail atau pasar (kali)	12	Kali	128.011.100	3	80.111.400								80.111.400	25%	63%
2.09.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1	Dokumen	28.743.600	0	1.680.000	-	-	-	-	-	-	0	1.680.000	0	0%

[illegible]

[illegible]

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.04.2.04.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	4.999.750	0	1.334.350	-	-	-	-	-	-	0	1.334.350	0	26,69%
3.25.04.2.04.00 03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	1	unit	569.339.150	0	111.825.351	-	-	-	-	-	-	0	111.825.351	0	19,64%
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan	2	Persen	215.303.200	0	14.868.600	-	-	-	-	-	-	0	14.868.600	0	6,91%
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan bagi Usaha	Jumlah usaha Pengolahan dan Pemasar Produk Hasil Perikanan	10	Unit Pengolah Ikan (UPI)	215.303.200	0	14.868.600	-	-	-	-	-	-	0	14.868.600	0	6,91%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Skala Mikro dan Kecil (UPI)															
3.25.06.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1	Unit usaha	215.303.200	0	14.868.600	-	-	-	-	-	-	0	14.868.600	0	6.91%
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN	Persentase Prasarana	30%	Persen	49.999.750	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian yang disediakan dan dikembangkan (%)															
3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1	Kawasan	49.999.750	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.27.03.2.01.00 15	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang Dikelola (dok)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang Dikelola (dok)	1	Dokumen	49.999.750	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	Persen	1.357.656.400	0	0	-	-	-	-	-	-	107.16 5.849	0		7,89%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		(Jumlah Kelurahan yang dilayani)															
3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi menular dalam Daerah kabupaten/Kota (kelurahan) Rabies	4240	Dosis		0	0	-	-	-	-	-	-	0	0		
		Flu Burung	600	Dosis													
3.27.04.2.01.00 08	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	300.124.200	1	25.214.250	-	-	-	-	-	-	1	25.214.250	25%	8,40%
3.27.04.2.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk	Jumlah hewan qurban yang diperiksa (ekor)	3000	ekor		0	2.305.000	-	-	-	-	-	-	0	2.305.000	0	4,33%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Hewan Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Pengujian pangan asal hewan (sample)	6	sample		0	0	-	-	-	-	-	-	0			
3.27.04.2.02.00 06	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	4	laporan	53.212.000	1	2.305.000	-	-	-	-	-	-	1	2.305.000	25%	4,33%
3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	7500	Ekor	1.004.320.200	2171	79.646.599	-	-	-	-	-	-	2171	79.646.599	29%	7,93%
		Jumlah penerimaan Retribusi kabupaten/Kota	303.215 .000	Rupiah		99.485.00 0		-	-	-	-	-	-	99.485. 000		33%	

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
3.27.04.2.03.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan		3	79.646.599	-	-	-	-	-	-	3	79.646.399	25	7.93%
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	Persen	9.411.700	0	1.989.905	-	-	-	-	-	-	0	1.989.905	0	21,14%
3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan (Rekomendasi)	6	Rekomen dasi	9.411.700	0	1.989.905	-	-	-	-	-	-	0	1.989.905	0	21,14%
3.27.06.2.01.00 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dok)	6	Dok	9.411.700	0	1.989.905	-	-	-	-	-	-	0	1.989.905	0	21,14%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76	Persen	1.565.576.050	0	43.982.193	-	-	-	-	-	-	0	43.982.193	0	2,81%
3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah kelompok tani	6	Kelompo k	1.565.576.050	0	43.982.193	-	-	-	-	-	-	0	43.982.193	0	2.81%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Penyuluhan Pertanian	yang naik skor kelompok (kelompok)															
3.27.07.2.01.00 02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	33	unit	101.999.750	8	10.220.000	-	-	-	-	-	-	8	10.220.00	24%	10,02%
3.27.07.2.01.00 03	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	unit	1.463.576.300	0	33.762.193	-	-	-	-	-	-	0	33.762.193	0	2,31%

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian telah tercapai sebesar 34,50% atau Rp. 6.221.170.947. Dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan II terhadap faktor pendorong yaitu :

- Adanya kerjasama antara Dispangtan dengan para pelaku usaha penyedia pangan juga didukung oleh kelurahan dan masyarakat sehingga Gerakan Pangan Murah dapat terselenggara dengan baik;
- Dalam upaya menurunkan angka stunting dan memperbaiki pola konsumsi masyarakat Kota Cimahi memperkenalkan pangan lokal, minat ibu ibu di Kota Cimahi untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang B2SA sangat tinggi;
- Sudah terbitnya SE (Surat Edaran) tentang Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya untuk mengurangi boros pangan;
- Adanya Surat Keputusan Bapanas No 3 Tahun 2025 tentang batas minimum penyediaan beras CPPD Tahun 2025, untuk Cimahi sebesar 64,43 Ton;
- Adanya Sosialisasi Keamanan Pangan bagi pelaku usaha;
- Sudah ada Perda RTRW untuk Lahan LP2B;
- Dalam pelaksanaan pemeriksaan Hewan Qurban ada tambahan tenaga dari PDHI Jabar dan mahasiswa magang.

Adapun faktor penghambat sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

- Kendala pada sistem pengadaan;
- Perubahan regulasi tentang pengadaan CPPD;
- Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang perlunya nomor registrasi keamanan pangan;

- Pada Puskesmas personel masih kurang untuk Dokter dan pendamping Dokter, ruangan pemeriksaan, belum adanya Lab untuk mendeteksi penyakit tertentu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pangan Dan Pertanian

Dengan mempertimbangkan pada pencapaian kinerja pada lima tahun sebelumnya serta memperhatikan beberapa perubahan lingkungan strategis Dinas, maka ada beberapa tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh Dinas ke depan. Tantangan dan peluang itu meliputi:

1. Di bidang pertanian terlihat bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk terjadi proses alih fungsi lahan pertanian menjadi Pemukiman atau pembangunan perumahan dan gedung-gedung tertentu untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat. Karenanya ke depan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah berupaya untuk menciptakan atau mengembangkan teknologi diversifikasi pangan melalui intensifikasi lahan dan optimalisasi lahan pekarangan sebagai lahan pertanian, peternakan dan perikanan dan pengembangan urban farming.
2. Tuntutan perubahan pola pikir dan perilaku petani dari petani subsistem tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis.
3. Adanya tuntutan ketersediaan aparatur pangan dan pertanian yang kompeten untuk mendukung pencapaian pembangunan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang memungkinkan ditingkatkan kemampuannya sebagai pelaku utama pembangunan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

4. Kecenderungan perekonomian Kota Cimahi ke depan didominasi oleh pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dan menurunnya industri manufaktur. Ini berarti adanya indikasi perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan sektor ekonomi di Kota Cimahi, yaitu dari sekunder menjadi tersier perlu dipersiapkan secara mantap dan matang. Selain itu terlihat juga bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat tidak sejalan, karena tingkat kemiskinan masyarakat masih relatif tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang kota yang menyatakan bahwa kebutuhan akan sandang murah berada pada peringkat nomor satu. Oleh karena itu, strategi untuk mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat harus dibangun dan dikembangkan. Hal tersebut dapat dilakukan ke depannya dengan menggerakkan kegiatan ekonomi yang mampu melibatkan lebih banyak sumber daya lokal dalam bentuk tenaga kerja lokal, bahan baku, kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan budaya lokal Kota Cimahi.
5. Demi kemudahan masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok, Dinas Pangan dan Pertanian akan meningkatkan intensitas Kegiatan pasar pangan murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta berkontribusi dalam rangka mengendalikan inflasi daerah;
6. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan juga peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mendukung kinerja para ASN dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung unit

penyumbang PAD demi peningkatan pendapatan dan lancarnya kinerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) .

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Cimahi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal kinerja awal RPD	Target				Realisasi		Target Renstra Tahun 2026	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)
				2023	2024	2025	2026	2023	2024		
1	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan (Nilai)	2136	2350	2350	2380	2380	2183	2186	2380	91,84
		Skor PPH Ketersediaan (Skor)	90,4	67,9	68	68	68	89,6	93,9	68	138,08
		Prosentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian (persen)	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,55	3,80	1,32	287,87
2	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (nilai)	22,79	30	30	35	45	77	78,74	45	174,97

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

Pada tahun 2024 untuk pencapaian indikator setingkat sasaran strategis terdapat beberapa indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu (1). Skor PPH ketersediaan, yang

capaiannya 93,9 dari target skor yang ditetapkan yaitu 68 tercapai sebesar 138,08 % (2). Prosentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian yang capaiannya 287,87 %, lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,32% dan nilai evaluasi reformasi birokrasi Dispangtan yang capaiannya 78,74 dari target yang telah ditetapkan di awal perencanaan yaitu 45.

Adapun capaian strategis yang sesuai dilaksanakan seperti target yang telah direncanakan di awal perencanaan adalah Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan yaitu sebesar 100% telah dilaksanakan.

Capaian strategis yang belum tercapai yaitu Nilai PPH ketersediaan hanya tercapai 2186 dari nilai target yang telah ditetapkan yaitu 2350.

Secara keseluruhan 90% capaian indikator di lingkup indikator sasaran strategis di Dinas Pangan dan Pertanian tercapai.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian merupakan salah satu SKPD yang keberadaannya diatur secara legal-formal dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru.

Kota Cimahi sebagai kota dengan karakteristik urban yang cukup padat menghadapi tantangan serius dalam sektor pangan dan pertanian. Luas lahan pertanian yang semakin sempit akibat alih fungsi lahan, meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk, serta rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan beberapa permasalahan yang harus segera diatasi. Selain itu, kondisi ketergantungan terhadap

pasokan pangan dari daerah luar memperlemah ketahanan pangan lokal.

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Cimahi masih terdapat isu-isu penting yang masih harus dijawab oleh kinerja Dispangtan diantaranya :

1. Penguatan ketahanan pangan Daerah;

Terkait penguatan ketahanan pangan daerah yang masih terus harus dilakukan adalah menyusun dan melaksanakan strategi ketahanan pangan berbasis potensi lokal, membangun cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap krisis pangan dan menjalin kerjasama dengan stakeholder (BUMD, swasta dan komunitas) untuk distribusi ketersediaan pangan.

2. Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming);

Terkait pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) yang masih terus harus dilakukan adalah mendorong pemanfaatan lahan sempit seperti pekarangan rumah, atap bangunan, dan lahan tidur untuk budidaya tanaman pangan, memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi masyarakat kota terkait teknik hidroponik, vertikultur, dan aquaponik dan Menjadikan urban farming sebagai bagian dari ketahanan pangan rumah tangga dan edukasi lingkungan.

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani;

Terkait peningkatan kesejahteraan petani yang masih harus terus dilakukan adalah memfasilitasi akses petani terhadap sarana produksi pertanian (benih, pupuk, alat), meningkatkan akses pasar melalui program kemitraan dan digitalisasi pemasaran produk pertanian dan melakukan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM petani secara berkelanjutan.

4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian;

Terkait maraknya alih fungsi lahan pertanian yang harus dilakukan adalah bersinergi dengan dinas terkait dalam menetapkan dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mengadvokasi kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlangsungan lahan pertanian dan menyusun insentif bagi pemilik lahan yang tetap mempertahankan fungsi lahannya sebagai lahan pertanian.

5. Inovasi dan Teknologi Pertanian;

Terkait inovasi dan teknologi pertanian yang harus dilakukan adalah mendorong penerapan teknologi tepat guna dan pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas lahan sempit, menyediakan akses informasi dan layanan digital kepada petani melalui platform e-pertanian daerah dan mengembangkan riset dan inovasi lokal bekerja sama dengan akademisi dan lembaga riset.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

Renja 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra dinas Pangan dan Pertanian 2025 -2029 yang juga berdasarkan rancangan awal RKPD 2026 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, maka selayaknya usulan/keinginan masyarakat dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Anggaran yang ada semampu mungkin dimaksimalkan untuk bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dan juga diselaraskan dengan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung pencapaian misi dan visi Kota Cimahi dan tema pembangunan di 2026 yaitu

”Penguatan Perwujudan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia”.

Adapun analisis kebutuhan anggaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 2.4 sebagai berikut

**Tabel 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi**

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				18.616.621.807,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				23.427.683.157	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.782.284.707,00	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.755.163.757	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			14.782.284.707,00	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			14.755.163.757	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	80,5	11.713.755.357,00	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	80,5	11.754.954.807	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	82,6				Nilai IKM Perangkat Daerah	82,6		
		Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB (78)				Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB (78)		
2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	18 Dokumen	547.047.700,00	2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 Dokumen	547.047.700,00	
2.09.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	40.000.100,00	2.09.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	40.000.100,00	
2.09.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	19.500.900,00	2.09.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	19.500.900,00	
2.09.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Lap	480.046.900,00	2.09.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Lap	480.046.900,00	
2.09.01.2.01.0007	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor	100 data	7.499.800,00	2.09.01.2.01.0007	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor	100 data	7.499.800,00	Subgiat baru pendukung dinas sebagai produsen walidata, cimahi satu data

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	14 kali	10.012.389.407,00	2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	14 kali	10.012.389.407,00	
2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang/bulan	10.012.389.407,00	2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang/bulan	10.012.389.407,00	
2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	68 orang	74.468.000,00	2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	68 orang	74.468.000,00	
2.09.01.2.05.011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68 orang	74.468.000,00	2.09.01.2.05.011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68 orang	74.468.000,00	
2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 bulan	395.567.550,00	2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan dukungan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	395.567.550,00	
2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.890.000,00	2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.890.000,00	
2.09.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.008.300,00	2.09.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.008.300,00	
2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.423.800,00	2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.423.800,00	
2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.198.450,00	2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.198.450,00	
2.09.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.474.000,00	2.09.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.474.000,00	
2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	213.573.000,00	2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	213.573.000,00	
2.09.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	2.09.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 bulan	367.360.000	2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 bulan	367.360.000	
2.09.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jab	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	167.400.000	2.09.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jab	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	167.400.000	
2.09.01.2.07.0011	Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	199.960.000,00	2.09.01.2.07.0011	Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	199.960.000,00	
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	286.389.000	2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	286.389.000	
2.09.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	2.09.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	
2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.376.600,00	2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.376.600,00	
2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.432.100,00	2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.432.100,00	
2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	195.914.000,00	2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	195.914.000,00	
2.09.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	179.470.000,00	2.09.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	179.470.000,00	
2.09.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 unit	16.444.000,00	2.09.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16.444.000,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
2.2. 09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan	100 Persen	300.000.150,00	2.2. 09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan	100 Persen	300.000.150,00	
2.2. 09.02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	55 Ton	300.000.150,00	2.2. 09.02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	55 Ton	300.000.150,00	
2.2. 09.02.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Unit	300.000.150,00	2.2. 09.02.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Unit	300.000.150,00	
2.2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	90,2 Skor	795.412.200,00	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	90,2 Skor	727.622.800	
2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pangan Pokok	12 Dokumen	256.909.800,00	2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pangan Pokok	12 Dokumen	256.909.800,00	
2.09.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 laporan	189.803.800,00	2.09.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 laporan	189.803.800,00	Dukungan untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah
2.09.03.2.01.00012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	9.475.000,00	2.09.03.2.01.00012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	9.475.000,00	
2.09.03.2.01.00016	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	20.020.000,00	2.09.03.2.01.00016	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	20.020.000,00	
2.09.03.2.01.00020	Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	37.611.000,00	2.09.03.2.01.00020	Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	37.611.000,00	
2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target	Persentase pelaksanaan kegiatan	100 Persen	538.502.400,00	2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target	Persentase pelaksanaan kegiatan pencapaian	100 Persen	538.502.400,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
	Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun				Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	target konsumsi pangan per kapita/tahun			
2.09.03.2.04.0005	Sub Kegiatan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Dokumen	538.502.400,00	2.09.03.2.04.0005	Sub Kegiatan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Dokumen	538.502.400,00	Merupakan kegiatan prioritas mendukung Kota Layak Anak Upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi ideal. Sosialisasi Diversifikasi pangan ke sekolah dan posyandu
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan	100 Persen	1.844.917.000,00	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan	100 Persen	1.844.386.000,00	
2.09.04.2.01	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.844.917.000,00	2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.844.386.000,00	
2.09.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.750.266.000,00	2.09.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.750.266.000,00	-Penyaluran Fortivikasi, Penyaluran CPPD Rawan Pangan, Penyaluran Susu dan Telur - Untuk dukungan dispangtan terkait stunting
2.09.04.2.02.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	72.366.000,00	2.09.04.2.02.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	72.366.000,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2 dokumen	22.285.000,00	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2 dokumen	22.285.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	98 Persen	128.200.000,00	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	98 Persen	128.200.000,00	
2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	24 kali	128.200.000,00	2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	24 kali	128.200.000,00	
2.09.05.2.01.0009	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	128.200.000,00	2.09.05.2.01.0009	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	128.200.000,00	Penggabungan dua subgiat baru : yaitu pembelian natura untuk uji sample pangan segar 2x sebulan, dan pembelian sarpras alat uji keamanan pangan. Laporan pengujian keamanan pangan 24 kali, dan fasilitasi untuk PSAT PDUK
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.968.792.150	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			991.844.100	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	290,5 Ton	787.611.500,00	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	290,5 Ton	787.611.500,00	
3.25.04.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha bidang Pembudidayaan ikan yang dilayani	100	14.558.400,00	3.25.04.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha bidang Pembudidayaan ikan yang dilayani	100	14.558.400,00	Merupakan kegiatan prioritas mendukung peningkatan UKM Cimahi
3.25.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,	5 Rekomendasi	14.558.400,00	3.25.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,	5 Rekomendasi	14.558.400,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
	dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8 Kelompok	145.441.050,00	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8 Kelompok	145.441.050,00	Pendampingan untuk pelaku usaha Budidaya ikan konsumsi dan ikan hias
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan Jumlah penerimaan retribusi	1. 290,5 (ton) 2.2.600.000 Ekor 3. Rp 60.472.500	627.612.050,00	3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan Jumlah penerimaan retribusi	1. 290,5 (ton) 2.2.600.000 Ekor 3. Rp 60.472.500	627.612.050,00	
3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	1 Dokumen	4.999.750,00	3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	1 Dokumen	4.999.750,00	Penyediaan data perikanan untuk Provinsi dan internal
3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	622.612.300,00	3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	622.612.300,00	Operaional BBIAT dan penambahan 198 juta untuk tandon air dan 30 jt untuk pembelian aquarium
3.25.04.2.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas kawasan konservasi	1 Kawasan	25.000.250,00	3.25.04.2.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas kawasan konservasi	1 Kawasan	25.000.250,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
3.25.04.2.05	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya	100 Persen	25.000.250,00	3.25.04.2.05	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya	100 Persen	25.000.250,00	
3.25.04.2.05.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	40 Pelaku Usaha	20.000.400,00	3.25.04.2.05.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	40 Pelaku Usaha	20.000.400,00	Pendampingan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan , amanat rakortekban Provinsi
3.25.04.2.05.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	4.999.850,00	3.25.04.2.05.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	4.999.850,00	
8.3.26.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	51,2 AKI	158.848.700,00	25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	51,2 AKI	158.848.700,00	
8.3.26.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	100 persen	158.848.700,00	8.3.26.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	100 persen	158.848.700,00	
25.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 pelaku usaha	158.848.700,00	25.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 pelaku usaha	158.848.700,00	Mendukung peingkatan UMKM
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1. 0,2 2. 0,2	1.295.665.900,00	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1. 0,2 2. 0,2	1.295.665.900,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
		2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan					2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
3.27.03.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 3.Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 5.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1.295.665.900,00	3.27.03.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 3.Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 5.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1.295.665.900,00	
3.27.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	71.999.500,00	3.27.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	71.999.500,00	sesuai arahan rakortek dilakukan pelaporan di akhir tahun
3.27.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	215.792.100,00	3.27.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	215.792.100,00	
3.27.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	764.012.000,00	3.27.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	764.012.000,00	
3.27.03.2.01.0014	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	182.149.900,00	3.27.03.2.01.0014	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	182.149.900,00	Fasilitasi sarpras alsin pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (meter)	1000	159.999.350,00	3.27.03.2.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (meter)	1000	159.999.350,00	

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 kawasan	159.999.350,00	3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 kawasan	159.999.350,00	
		Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit				Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		
3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 unit	109.999.900,00	3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 unit	109.999.900,00	Pendampingan untuk pelaku usaha peternakan (pelatihan dan Promosi)
3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	49.999.450,00	3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	49.999.450,00	Apraisal dan Pembebasan Lahan untuk LP2B secara bertahap selama 2026-2028 Pagu awal input Rp.4.999.999.450 rasionalisasi Rp.4.980.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 persen	1.395.211.650,00	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 persen	1.395.211.650,00	
3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies)	1300 Dosis	474.999.650,00	3.27.04.2.02	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies)	1300 Dosis	474.999.650,00	Hasil koordinasi dengan pusat untuk vaksinasi Rabies ke ruminansia belum di prioritaskan
		Jumlah Hewan yang divaksinasi (flu burung)	600 Dosis				Jumlah Hewan yang divaksinasi (flu burung)	600 Dosis		

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	75 orang	199.999.850,00	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	75 orang	199.999.850,00	Fasilitasi untuk kader zoonosis (kolaborasipemerintah dan masyarakat untuk peningkatan Kesmavet)
3.27.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	274.999.800,00	3.27.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	274.999.800,00	Vaksinasi untuk mendukung kesmavet (Rabies dan Flu burung) ke 15 kelurahan
3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerimaan Retribusi UPT Puskesmas	Rp. 310.000.000	820.212.200,00	3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerimaan Retribusi UPT Puskesmas	Rp. 310.000.000	820.212.200,00	
		Jumlah hewan yang dilayani	7750 ekor				Jumlah hewan yang dilayani	7750 ekor		
3.27.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	820.212.200	3.27.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	820.212.200	Oprasional UPT Puskesmas – rintisan pembentukan BLUD Puskesmas untuk menunjang LPE, peningkatan PAD
3.27.04.2.04	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Jumlah hewan qurban yang diperiksa 2. Jumlah sample produk asal hewan yang diperiksa 3. Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet	1. 3613 ekor 2. 10 sample 3. 1 kegiatan	99.999.800,00	3.27.04.2.04	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Jumlah hewan qurban yang diperiksa 2. Jumlah sample produk asal hewan yang diperiksa 3. Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet	1. 3613 ekor 2. 10 sample 3. 1 kegiatan	99.999.800,00	
3.27.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 laporan	80.000.000,00	3.27.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 laporan	80.000.000,00	-Pemeriksaan hewan qurban -Fasilitasi APD untuk petugas pemeriksa hewan qurban. -BPJS Ketenaga kerjaan untuk petugas hewan qurban -Pemeriksaan

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif	
										keamanan pangan asal hewan harus ASUH aman, sehat, utuh, halal), (bebas salmonella, bebas daging babi, bebas tiren, dll)
3.27.04.2.03.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	100 orang	19.999.800,00	3.27.04.2.03.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	100 orang	19.999.800,00	- World Rabies Day - Penyuluhan kesmavet untuk masyarakat
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100 Persen	11.999.750,00	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100 Persen	11.999.750,00	
3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	8 rekomendasi	11.999.750,00	3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	8 rekomendasi	11.999.750,00	
3.27.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 laporan	11.999.750	3.27.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 laporan	11.999.750	

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang telah dilaksanakan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Cimahi untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2026.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik Renstra 2025-2029, tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2026 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kota Cimahi bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan di Kota Cimahi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.32) berikut ini:

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
				Usulan	Masalah
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	RW 08 Kel. Padasuka	Jumlah produksi ikan konsumsi (Ton)	290,5	Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Dibutuhkan pendampingan untuk budidaya ikan lele dan ikan mas
Sub Kegiatan Pemberian pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	RW 10 Kel. Citeureup	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.380.000		
				Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Dibutuhkan pendampingan untuk budidaya perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	RW 04 Cibeber, Cimahi Selatan	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas (persen)	10	Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Kurangnya lapangan pekerjaan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cipageran RW 19 dan RW 25 Kota Cimahi, Cimahi Utara	-		Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Pembinaan dan pemodalan untuk pertanian
	Cibodas cempaka rw 09, Kel. Utama Cimahi Selatan			Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Pemahaman budidaya perikanan dan pertanian kurang optimal

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
				Usulan	Masalah
	Jl Nanjung Cibodas RW 11, Kel. Utama Cimahi Selatan	-		Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	kurangnya wawasan bagi petani dan peternak
	lembur sawah RW 12 dan RW 16, Kel. Utama Cimahi Selatan	-		Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Kurangnya pembinaan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Baros, Cimahi Tengah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian (persen)	100	Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Sulitnya akses pembelian bibit tanaman
Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi untuk tahun 2026, yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan hasil penyesuaian dan penajaman terhadap kerangka kebijakan yang telah disusun sebelumnya dan sudah diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam dokumen perencanaan tahun 2026 yang merujuk pada rancangan awal RPJMD Provinsi 2025-2029, dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024, kondisi ekonomi awal tahun 2025, dan proyeksi tantangan perekonomian.

Penyusunan sasaran dan prioritas Pembangunan dalam dokumen Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026 didasarkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan strategis di Tingkat nasional dan daerah, penyesuaian terhadap kerangka perencanaan jangka menengah yang baru, serta hasil evaluasi capaian Pembangunan hingga Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, dinamika kondisi fiskal, social dan ekonomi Kota Cimahi menjadi faktor krusial yang mendorong realokasi belanja serta penyesuaian sasaran Pembangunan tahunan.

Secara normatif, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu tujuan Pembangunan

daerah. Sementara itu prioritas Pembangunan daerah adalah focus strategis penyelenggaraan pemerintahan yang disusun secara selektif dan bertahap untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan daerah.

Dalam konteks perubahan RKPD Tahun 2026, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Cimahi mempertimbangkan lima dasar pertimbangan utama yang telah dijabarkan dalam Bab I, yaitu:

1. Penyesuaian terhadap dokumen perencanaan jangka menengah terbaru, mencakup RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029, dan RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, yang memuat arah pembangunan baru berdasarkan visi dan misi kepala daerah hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Arahan Pemerintah Pusat melalui SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, yang menggarisbawahi prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja;
3. Kebijakan Inmen No. 2 Tahun 2025 sebagai panduan sistematis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pedoman terbaru untuk menyusun *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* dan *Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah* periode **2025–2029**, meliputi tahapan, tata cara, sistematika, dan substansi;
4. Kebijakan efisiensi belanja daerah sebagaimana tertuang dalam SE Mendagri Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan optimalisasi belanja strategis dan penyesuaian terhadap realisasi pendapatan daerah, terutama TKD;

5. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 hingga Triwulan II Tahun 2025, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian terhadap indikator, target sasaran, dan pengalokasian anggaran agar lebih realistis dan responsif terhadap kondisi lapangan;
6. Perubahan proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah, yang mendorong perlunya penguatan efisiensi fiskal dan reorientasi belanja pada program dan kegiatan prioritas.

Berangkat dari enam dasar pertimbangan tersebut, sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator kunci dalam RPJMD, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap capaian pelayanan dasar dan penguatan reformasi birokrasi. Sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah, yang dipilih berdasarkan tingkat urgensi, manfaat strategis, dan keterkaitannya dengan penyelesaian isu-isu pembangunan.

3.1 Prioritas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang Mendukung

Prioritas Pemerintah Kota

3.1.1 Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

“CIMAHI MANTAP”

MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU, UNGGUL
DAN BERKELANJUTAN”

Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

MAJU : Mewujudkan Pembangunan Kota Cimahi yang lebih maju di segala bidang

AGAMIS : Menciptakan kota yang agamis serta menjunjung tinggi nilai religious dan toleran

NYAMAN: Menuwujudkan lingkungan asri dan berkelanjutan dengan fasilitas ruang ekspresi public yang representatif

TELADAN: Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas

AMAN: Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan teratur

PRODUKTIF : Meningkatkan daya kretivitas masyarakat yang produksti menuju masyarakat sejahtera.

Dengan demikian visi “CIMAHI MANTAP” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan mejadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religious akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik

3.1.2 Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Untuk mengaktualisasikan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis, dan Berkarakter

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta karakter dan spiritualitas masyarakat, yang menjadi fondasi daya saing daerah.

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif

Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, UMKM, sektor kreatif, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif.

3. Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Mengedepankan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, partisipatif, serta berbasis inovasi dan digitalisasi pelayanan publik.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan

Bertujuan untuk menciptakan kota yang layak huni, sehat, dan resilien terhadap perubahan iklim dan bencana.

5. Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi

Misi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, serta penguatan solidaritas dan ketahanan sosial.

Kelima misi ini selanjutnya akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas terhadap program dan kegiatan pembangunan tahunan, sehingga terjaga kesinambungan antara kebijakan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan. Dalam konteks penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2026, perumusan merujuk pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan resmi hasil penetapan kepala daerah terpilih pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2025–2029, yang telah dirumuskan secara sistematis dalam RPJMD, serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang terukur. Penyusunan tujuan dan sasaran juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2026, serta diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 untuk memastikan integrasi vertikal perencanaan antar-tingkatan pemerintahan.

Dengan demikian, penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

1. Menjamin konsistensi antara visi-misi kepala daerah dan pelaksanaan program tahunan,
2. Meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan melalui indikator yang dapat diukur secara periodik,
3. Mengintegrasikan kepentingan pembangunan Kota Cimahi dalam kerangka nasional dan provinsi,
4. Menyusun prioritas yang responsif terhadap kondisi faktual dan hasil evaluasi pembangunan tahun berjalan.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2024

Dalam rangka mengarahkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi visi dan arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Asta Cita tidak hanya merupakan janji politik, tetapi telah dirumuskan secara teknokratis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–

2029 dan dijadikan dasar penyusunan delapan Prioritas Nasional yang menjadi kerangka utama pembangunan nasional lima tahunan.

Asta Cita mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan negara dalam seluruh aspek kehidupan rakyat dengan menekankan pada transformasi struktural, keadilan sosial, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Agenda ini mencakup bidang ideologi, ekonomi, sosial, hukum, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Adapun kedelapan Asta Cita yang menjadi landasan arah pembangunan nasional adalah:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Asta Cita tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara menyeluruh dengan sasaran pembangunan nasional yang terukur dan berbasis hasil (*outcome-based development*). Sasaran pembangunan nasional Tahun 2025–2029 disusun sebagai representasi keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan transformasi menuju *Indonesia Maju* dan mendekati status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Sasaran ini terstruktur dalam beberapa dimensi strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengaruh global. Secara garis besar, sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 mencakup hal-hal berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju

Sasaran ini mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Target utama meliputi:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dari 5,05% pada tahun 2024 menjadi 5,3% pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 8% pada tahun 2029;

- 2) Kenaikan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dari USD 4.870 (2023) menjadi USD 5.410 (2025), hingga mencapai USD 8.000 (2029);
- 3) Peningkatan kontribusi sektor-sektor strategis, yaitu PDB Maritim dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029), serta PDB Manufaktur dari 18,67% (2023) menjadi 21,9% pada 2029.

2. Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat

Indonesia menargetkan peningkatan posisi dalam kancah global melalui penguatan diplomasi dan kapasitas nasional. Hal ini tercermin dari peningkatan peringkat Global Power Index, dari posisi 34 (2023) menjadi 33 (2025), dan 29 (2029), yang mencerminkan pengakuan atas peran strategis Indonesia dalam geopolitik internasional.

3. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Penurunan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan. Targetnya adalah:

- 1) Menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7–8% (2025), dan 4,5–5,0% (2029);
- 2) Penghapusan kemiskinan ekstrem hingga kurang dari 0,5% pada 2026;
- 3) Penurunan rasio gini dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378–0,382 (2025) dan 0,372–0,375 (2029);
- 4) Peningkatan kontribusi sektor KTI (Knowledge and Technology Intensive) dalam PDRB dari 20,9% (2023) menjadi 22,4% (2029).

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Target yang ditetapkan adalah peningkatan Indeks

Modal Manusia (IMM) dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025), dan 0,59 (2029), yang mencerminkan peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta produktivitas tenaga kerja.

5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission

Pembangunan rendah karbon dan pelestarian lingkungan menjadi pilar penting. Sasaran utama adalah:

- 1) Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029);
- 2) Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Sasaran-sasaran tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah. Sasaran ini juga menjadi dasar pengukuran keberhasilan pembangunan lintas sektor secara berkelanjutan.

Kedelapan Asta Cita memberikan arah normatif dan ideologis, sementara sasaran pembangunan nasional yang menyertainya memberikan ukuran teknokratis yang wajib dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan RKPD.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Asta Cita dengan Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1
Keselarasan antara Asta Cita dengan
Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	Penguatan demokrasi, toleransi, dan kehidupan berbangsa	Misi 5: Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan	Membangun masyarakat inklusif, harmonis, dan partisipatif

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
		masyarakat melalui kolaborasi antar generasi	
2. Memantapkan pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa	Ketahanan pangan, energi, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif	Penguatan ekonomi lokal dan kemandirian daerah berbasis potensi unggulan
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Konektivitas wilayah, wirausaha, industri kreatif dan digital	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Mendukung infrastruktur produktif dan lapangan kerja inovatif
4. Memperkuat pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, kepemudaan	Misi 1: Mewujudkan Kota Cimahi yang maju dengan sumber daya manusia yang unggul, agamis dan berkarakter	Penekanan pada kualitas manusia dan pembentukan karakter warga
5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri SDA	Hilirisasi tambang, pertanian, kelautan, dan industri strategis	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif	Mendorong nilai tambah ekonomi dan daya saing lokal

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
6. Membangun dari desa dan dari bawah	Penguatan desa, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi	Misi 5: Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar generasi	Pendekatan berbasis komunitas dan keadilan sosial
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Reformasi kelembagaan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi	Misi 3: Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata kelola pemerintahan	Reformasi birokrasi, pelayanan digital, dan transparansi
8. Memperkuat harmoni sosial, lingkungan, budaya, dan toleransi	Perubahan iklim, pelestarian budaya, dan keberlanjutan	Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Penataan lingkungan dan budaya lokal yang adaptif dan ramah iklim

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2029 melalui visi “**Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata.**” Visi ini mencerminkan tekad untuk memperkuat peran wilayah perdesaan (lembur) dan perkotaan (kota) secara berimbang, melalui pendekatan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis pada keunggulan lokal.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dituangkan secara sistematis dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Penelaahan terhadap dokumen tersebut menjadi penting bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelaraskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025, terutama dalam konteks kawasan strategis Bandung Raya.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran
Tujuan 1 Terwujudnya SDM yang <i>Cageur, Bageur, Bener, Pinter dan Singer</i>	– Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; – Terbentuknya individu beretika dan berbudaya; – Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum; – Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; – Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.
Tujuan 2.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	– Meningkatkan produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri; – Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan; – Meningkatkan Sektor Perdagangan melalui Optimalisasi Disttibusi Barang dan Jasa;

Tujuan	Sasaran
	- Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Insutri Kreatif.
Tujuan 2.2 Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha	- Meningkatkan Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja; - Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja; - Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan	- Meningkatkan Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan; - Meningkatkan Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; - Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat.
Tujuan 4.1 Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi	- Meningkatkan Penerapan Iptek, Riset dan Inovasi dalam pembangunan; - Meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Tujuan 4.2	- Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Gesit dan Berorientasi Pelayanan	

Sumber: Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat

3.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Adapun Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran
Kota Cimahi Tahun 2026

Misi Teknokratis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia		IPM	80,64
		Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,79
		Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan	Harapan Lama Sekolah	13,92

Misi Teknokratis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
		kualitas pendidikan		
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Produktif	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi		PDRB Per kapita	79,68-80,65
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE	5,72-6,22
		Menurunnya tingkat pengangguran	TPT	8,69-9,49
Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	86
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	86,79
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota		Indeks Perkotaan Berkelanjutan	70,1
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	50.60
		Meningkatnya stabilitas wilayah	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	50,01
Meningkatkan perlindungan			Indeks GINI	0,369-0,392

Misi Teknokratis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
dan pemberdayaan masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	0,58
			Tingkat Kemiskinan	3,79-4,12

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1.1 Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Penyusunan Renja 2026

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap penyusunan Renja 2026 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan Inmen No. 2 Tahun 2025
2. Adanya Surat Keputusan Bapenas No.3 Tahun 2025 tentang batas minimum penyediaan beras CPPD Tahun 2025 untuk Kota Cimahi sebesar 64,43 Ton.
3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten Kota dan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26159/Pk.430/F/03/2025 Hal pembentukan Kader pemantauan dan Tindakan Cepat Kejadian Zoonosis (Kader Zoonosis) tanggal 26 maret 2025;
4. Dukungan Program Kota Layak Anak, Kebijakan LP2B, Program Stunting dan Kemiskinan.

3.1.2 Uraian Garis Besar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk tahun 2026 Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 merupakan adaptasi dari Inmen No. 2 Tahun 2025 untuk dukungan program kegiatan yang

mendukung kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dukungan untuk program Kota Layak Anak, Kebijakan LP2B, Program Stunting dan kemiskinan, Peningkatan PAD Dispangtan dan Operasional kinerja Dinas Pangan dan Pertanian lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada tahun 2026 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi akan melaksanakan 11 (sebelas) program, 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Program-program tersebut secara menggambarkan 5 (lima) kelompok kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatan yang terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan urusan pangan, yaitu : peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan masyarakat;
2. Kegiatan yang terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan urusan pertanian, yaitu : penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian dan penyuluhan pertanian;
3. Kegiatan yang terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan urusan kelautan dan perikanan, yaitu : pengelolaan perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah;
5. Kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang terkait dengan administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, penyediaan jasa pelayanan

umum dan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 pada umumnya sebagian besar dilaksanakan di seluruh wilayah kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan di Kota Cimahi.

TABEL 4.5
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						Dinas Pangan dan Pertanian						18.616.621.807,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.782.284.707,00
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						14.782.284.707,00
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			80,5 82,6 BB Nilai (78)	11.713.755.357,00
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	-			18 Dokumen	547.047.700,00
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	40.000.100,00
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	19.500.900,00
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	480.046.900,00
	2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup				100 Data	7.499.800,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Perangkat Daerah					
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	-			14 Kali	10.012.389.407,00
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	10.012.389.407,00
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	-			68 Orang	74.468.000,00
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				68 Orang	74.468.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum	-			12 Bulan	395.567.550,00
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.890.000,00
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	102.008.300,00
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.423.800,00
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.198.450,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.474.000,00
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	213.573.000,00
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	367.360.000,00
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	167.400.000,00
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	199.960.000,00
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	-			100 Persen	121.008.700,00
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.200.000,00
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	91.376.600,00
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	28.432.100,00
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	195.914.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						Pemerintahan Daerah						
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	179.470.000,00
	2	09	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	16.444.000,00
2	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan	-			100 persen	300.000.150,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-			55 Ton	300.000.150,00
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	300.000.150,00
3	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	-			90,2 skor	795.412.200,00
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pahan Pokok	-			12 Dokumen	256.909.800,00
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				4 Laporan	189.803.800,00
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Laporan Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12-Laporan	9.475.000,00
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	20.020.000,00
	2	09	03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						
							Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	37.611.000,00
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan	Persentase pelaksanaan kegiatan pencapaian target konsumsi	-			100 Persen	538.502.400,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						Angka Kecukupan Gizi	pangan per kapita/tahun					
	2	09	03	2.04	0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
							Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Dokumen	538.502.400,00
4	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan	-			100 persen	1.844.917.000,00
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	-			100 Persen	1.844.917.000,00
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah dokumen Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada				1 Dokumen	1.750.266.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						
							Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	72.366.000,00
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	22.285.000,00
5	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	-			98 Persen	128.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	-			24 kali	128.200.000,00
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2 Dokumen	128.200.000,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.834.337.100,00
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						971.460.450,00
6	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			290,5 Ton	787.611.500,00
	3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha bidang Pembudidaya ikan yang dilayani	-			100 Persen	14.558.400,00
	3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	145.441.050,00
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Jumlah Ikan Konsumsi yang dihasilkan (ton) 2. Jumlah Benih Ikan Hias yang Dihasilkan (Ekor) 3. PAD yang Dihasilkan (Rp)	-			1. 290,5 (ton) 2. 2.600.000 Ekor 3. Rp 60.472.500	627.612.050,00
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.999.750,00
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	622.612.300,00
7	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	-			1 Kawasan	25.000.250,00
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya	-			100 persen	25.000.250,00
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				40 Pelaku Usaha	20.000.400,00
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				10 Pelaku Usaha	4.999.850,00
8	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi ikan	-			51,2 AKI	158.848.700,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	-			100 Persen	158.848.700,00
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	158.848.700,00
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.862.876.650,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
9	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-			1. 0,2 2. 0,2	1.295.665.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 3.Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 5.Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	-			1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1.295.665.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	71.999.500,00
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	61.712.400,00
	3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				1 Laporan	215.792.100,00
	3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura						
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura				1 Laporan	764.012.000,00
	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan						
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				1 Laporan	182.149.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
10	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (meter)	-			1000 m	159.999.350,00
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang dikelola	-			1 Kawasan	159.999.350,00
							Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	
	3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	109.999.900,00
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang dikelola				1 Dokumen	49.999.450,00
11	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-			100 persen	1.395.211.650,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies/flu burung)	-			1300/600 Dosis	474.999.650,00
	3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis						
							Jumlah kader zoonosis				75 Orang	199.999.850,00
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	274.999.800,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Retribusi Puskesmas 2. Jumlah hewan yang dilayani Puskesmas	-			1.Rp.310.000.000 rupiah 2. 7750 ekor	820.212.200,00
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	820.212.200,00
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Jumlah hewan qurban yang diperiksa 2. Jumlah sample produk asal hewan yang diperiksa 3. Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet	-			1. 3613 ekor 2. 10 sample 3. 1 kegiatan	99.999.800,00
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	80.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan						
							Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				100 Orang	19.999.800,00
12	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	-			100 persen	11.999.750,00
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi kelayakan Usaha Pertanian	-			8 rekomendasi	11.999.750,00
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						
							Jumlah <u>laporan</u> Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				2 Dokumen	11.999.750,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							J U M L A H	18.616.621.807,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi, khususnya pada sektor pangan, pertanian, dan perikanan. Dokumen ini menjadi arah strategis bagi seluruh bidang di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi pangan masyarakat, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai pedoman dalam menyusun program/kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.616.621.807,00 yang dialokasikan untuk belanja gaji dan belanja operasional.

Melalui perencanaan yang terukur, terarah, dan berbasis data, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan akses pangan, pengembangan sumber daya petani dan pelaku usaha, peningkatan keamanan pangan, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi di sektor pangan dan pertanian.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dengan komitmen bersama, Dinas Pangan dan Pertanian

Kota Cimahi siap melaksanakan seluruh agenda kerja yang telah disusun guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik, ketahanan pangan yang kuat, serta pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cimahi

